

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  
KEUANGAN PADA PUSAT PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Oleh

**HAFIZH BILLY ANISMAN**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE IN  
REGIONAL GOVERNMENT INCOME CENTERS OF TULANG BAWANG  
REGENCY**

*(Study on the Regional Government of Tulang Bawang Regency)*

**By**

**Hafizh Billy Anisman**

*This research is a research that uses a qualitative descriptive method. By explaining what factors affect the financial performance of the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency in increasing the realization of Regional Original Income (PAD) with the aim of knowing the causes of the lack of realization of Regional Original Income within the Tulang Bawang Regency. And after analyzing some of these factors, in this study will determine what strategies can be applied by the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency in increasing the realization of Regional Original Income. This research is also expected to be used as a reference by the Regional Revenue Agency of Tulang Bawang Regency to assist in increasing the realization of the Regional Original Income of Tulang Bawang Regency in the coming year.*

***Keywords: Regional Original Revenue, Qualitative Descriptive, Strategy, Regional Revenue Agency, and Realization.***

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PUSAT PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**

**By**

**Hafizh Billy Anisman**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dengan menjelaskan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang. Dan setelah menganalisa beberapa faktor tersebut, dalam penelitian ini akan menentukan strategi apa saja yang bisa diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga diharapkan untuk dijadikan refrensi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu dalam peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang ditahun yang akan datang.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Deskriptif Kualitatif, Strategi, Badan Pendapatan Daerah, dan Realisasi.**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA  
KEUANGAN PADA PUSAT PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh

*Hafizh Billy Anisman*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

**: ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN  
PADA PUSAT PENDAPATAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten  
Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa

**: Hafizh Billy Anisman**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1611031068**

Program Studi

**: Akuntansi**

Fakultas

**: Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**  
NIP 19780723 199003 1002

**Yunia Amelia, S.E., M.Si., Akt., CA.**  
NIP 19820615 201504 2001

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

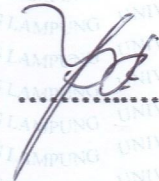
**Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP 197008171997032002



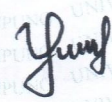
**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

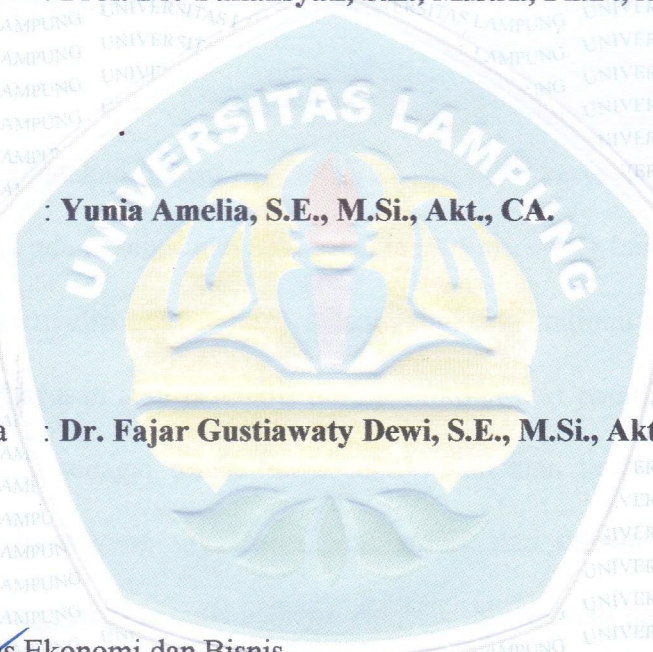
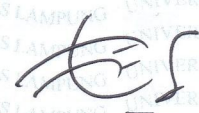
**Ketua : Prof. Dr. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.** .....



**Sekretaris : Yunia Amelia, S.E., M.Si., Akt., CA.** .....



**Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.** .....



**2 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Dr. Nairobi, S.E., M.Si**  
**NIP 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 April 2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafizh Billy Anisman

NPM : 1611031068

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, ambil, dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 April 2021

Penulis



Hafizh Billy Anisman

NPM : 1611031068



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 03 Februari 1999 dengan nama lengkap Hafizh Billy Anisman sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Ferli Yuledi, S.P., M.M., M.T dan Ibu dr. Feby Levarina, Sp.PK.,M.Kes.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak- Kanak Al - Islamiyah pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Al – Kautsar dan lulus pada 2010, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Darma Bangsa pada tahun 2013, dan menyelesaikan SMA Darma Bangsa pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis terdaftar menjadi anggota HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila. Dan kini penulis fokus dibidang kreatif menjadi seorang podcaster di salah satu platform digital.



## **MOTTO**

**“Seseorang yang bisa menghargai gelap pasti dia bisa menghargai terang,  
sedangkan orang yang bisa menghargai terang belum tentu dia bisa  
menghargai gelap”**

**(ARIEL NOAH)**

## **PERSEMBAHAN**

### *Alhamdulillahirobbil'alamin*

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kelancaran, keberkahan, dan karunia-Nya, karya ini kupersembahkan kepada:

#### **Kedua orangtua tercinta, Bapak Ferli Yuledi dan Ibu Feby Levarina**

Terimakasih telah mendukungu secara moril maupun materil serta selalu mengasihi dan mendoakan setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas pengertian dan perhatian yang telah kalian berikan.

#### **Keluarga Besar, Sukriman Anwar dan Anis Pik**

Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan perhatian seluruh keluarga.

#### **Seluruh Sahabat dan Teman Seperjuangan**

Terima kasih atas pengalaman bersama, pelajaran hidup yang kita lalui, dukungan, semangat dan motivasi.

serta

**Almamaterku tercinta**

**Universitas Lampung.**

## SANWACANA

*Bismillahirrohmaanirrohiim,*

Puji Tuhan penulis ucapkan kepada Allh SWT yang telah menyertai penulis dengan segala berkat dan kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupate Tulang Bawang (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Prof. Dr. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, kritik, saran, dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak bapak atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih untuk kesediaannya memberikan waktu, bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan yang telah memberikan saran dan nasihat selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku yang ku kasihi dan sayangi, Papa Ferli Yuledi S.P., M.M., M.T. dan Mama dr. Feby Levarina, SpPK.,M.Kes. yang selalu tidak bosan memberikan dukungan untuk penulis hingga selesai masa studi.



10. Kakak dan adikku: Sintha Utami Firatria, Dwi Wulansari, Deavivian Adhara, Adelio Fawwaz Adhara, dan Khanza Dwita Firatria. Terimakasih untuk segala nasihat dan perhatian yang sangat luar biasa.
11. Keluarga Besar Sukirman Anwar dan Keluarga Besar Anis Pik yang tidak dapat penulis ucapkan satu-satu terimakasih atas doa, nasihat dan dukungan yang diberikan.
12. Teman seperjuangan skripsi: Ibnu Trilaksono, Julio Hartawan, dan Muhammad Fazares yang selalu berani memarahi penulis ketika malas bahkan sampai berkas – berkasnya pun dibuatin.
13. PODLOT (Podcast Nyolot): Kafitan Aryuan dan Muhammad Ghazali yang selalu ada dalam situasi apapun
14. CILGENG: Muzdalifa, Rian Nuriman Kurniawan, Ferindo Saputra, Hari Tri Prayoga, Agita KW, Jordan Bimandama, dan Suwardi Rosdi yang bantuannya kurang signifikan tapi dapat menghibur di segala suasana
15. Grup jamet: Muhammad Irvan Santoso, Leoanisya, Ibnu Trilaksono yang selalu gak modal dan nyusahin penulis.
16. HAHAIHI: Rizky Suryo, Ariqsi Thoriq, Lucky Satria, M Nur Rabbani, dan Dede Rahman yang selalu mensupport penulis selama masa perkuliahan
17. Fabio Anugrah, Rifqi Fauzi, Utami Kartika, Khairul Ihwan, dan Dheandra Filia yang membuat masa pembelajaran kuliah menjadi berwarna.
18. Teman – teman angkatan dari Akuntansi 16: Derra Prasetya, Farel, Daniel, Prakas, Samuel, Arif Mahasin, Friska, Alfi, Yolanda dan seluruh keluarga besar Akuncuy16 yang saling membantu satu sama lain.

19. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) yang telah memberi pengalaman dalam berorganisasi dan dalam pengasahan softskill yang dimiliki oleh penulis.
20. Almamater Tercinta.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Bandar Lampung, April 2021  
Penulis,

Hafizh Billy Anisman

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	12
2.1.1. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	13
2.1.1.1. Efektivitas .....	13
2.1.1.2. Kontribusi .....	14
2.1.1.3. Efisiensi .....	14
2.1.2. Strategi .....	15
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah .....	16
2.1.4. Pusat Pertanggungjawaban Pada Sektor Publik .....	19
2.1.5. Otonomi Daerah .....	23
2.1.6. Desentralisasi Fiskal .....	24
2.2. Penelitian Terdahulu .....	25
2.3. Kerangka Pemikiran .....	27

<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	29
3.2. Lokasi Penelitian .....	30
3.3. Waktu Penelitian.....	30
3.4. Subjek Penelitian .....	30
3.5. Objek Penelitian.....	31
3.6. Tehnik Pengumpulan Data .....	31
3.7. Metode Analisis .....	32
3.8. Tehnik Analisis Data .....	33
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Penentuan Faktor-Faktor .....	34
4.2 Analisis Pajak Daerah.....	37
4.3 Analisis Retribusi Daerah.....	39
4.4 Analisis Laba Perusahaan Daerah .....	41
4.5 Analisis Lain – Lain PAD yang Sah.....	43
4.6 Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah .....	45
4.7 Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang .....	45
4.8 Masalah dan Kendala Pemungutan Pendapatan Asli Daerah .....	48
4.9 Standar Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah .....	55
4.10 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	59
<b>V. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran .....	66
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 – 2019 .....	6
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 - 2019 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	31
Tabel 4.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pendapatan Asli Daerah .....	32
Tabel 4.3 Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi) .....	33
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 - 2019 .....	34
Tabel 4.5 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 - 2019 .....	35
Tabel 4.6 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 – 2019 .....	36
Tabel 4.7 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 - 2019 .....	37
Tabel 4.8 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 - 2019 .....	38
Tabel 4.9 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 – 2019 .....	38
Tabel 4.10 Penerimaan Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 - 2019 .....	39



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak di capai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program – program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Pengendalian manajemen tersebut terdiri dari beberapa tahap mulai dari perencanaan, koordinasi antar bagian, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian hingga penilaian kinerja.

Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer atau kepala yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

Pusat pertanggungjawaban terdiri dari empat jenis yaitu: pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pada sistem pengendalian manajemen sektor publik keempat pusat

pertanggungjawaban tersebut memiliki tanggungjawab masing – masing bagian. Pusat tanggungjawab besar tersebut dapat dipecah – pecah lagi menjadi pusat – pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program, misalnya dinas – dinas atau subdinas – subdinas. Dari pusat pertanggungjawaban besar, ada satu pusat pertanggungjawab yang pencapaiannya akan menjadi sorotan publik maupun Pemerintah Daerah tersebut yaitu Pusat Pendapatan.

Seperti sistem pengendalian manajemen pada umumnya sebuah pusat pertanggungjawaban menjalankan aktivitasnya mulai dari perencanaan hingga penilaian. Dalam pusat pendapatan, jika pusat pertanggungjawaban tersebut tidak bisa memenuhi atau mencapai target yang sudah di rencanakan maka dapat dibilang bahwa pusat pendapatan tersebut belum maksimal menjalankan tugasnya, dan dari hasil atau input dari pusat pendapatan yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang dimana PAD tersebut akan digunakan dan di setor kepada negara untuk menjalankan program atau pembangunan di masa yang akan datang.

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada



bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah

daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.”

Untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Maka kewenangan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang dipegang oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Adapun pungutan yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2019

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2014	27.459.724.804,00	24.444.892.153,16	89,02
2015	41.437.926.544,00	34.088.549.868,37	82,26
2016	48.000.000.000,00	26.416.719.389,70	55,03
2017	114.132.547.876,00	40.931.506.761,84	35,86
2018	103.010.560.046,00	31.899.710.333,70	30,96
2019	97.315.725.842,00	38.501.150.576,17	39,58

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerahnya tidak mencapai target yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dari tahun ke tahun dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 target yang di tetapkan sangat melonjak naik dari tahun sebelumnya dan pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2018 targetnya menurun dari jumlah tahun sebelumnya dan begitu juga di tahun 2019. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi fluktuasi atau terjadi naik turunnya terget dari 2 tahun tersebut dan apakah penentuan target yang telah di tetapkan sudah sesuai peraturan yang berlaku? Dan mengapa ketika target tersbut di naikkan atau di turunkan tidak membuat Pendapatan Asli Daerah terealisasi?

Berikut ini realisasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama tahun 2014-2019:

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang  
Tahun 2014-2019

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain - Lain PAD Yang Sah	Total PAD
2014	13.175.797.961,00	2.915.095.518,00	3.520.417.055,97	4.833.581.618,19	24.444.892.153,16
2015	14.503.936.668,12	4.967.170.100,00	3.553.189.114,12	11.064.253.986,13	34.088.549.868,37
2016	14.107.628.345,00	2.301.230.460,50	3.612.546.642,96	6.395.313.941,24	26.416.719.389,70
2017	20.788.976.113,00	1.628.987.025,00	3.047.289.317,24	15.466.254.306,60	40.931.506.761,84
2018	19.836.334.510,00	1.530.349.650,00	3.078.119.812,53	7.454.906.361,17	31.899.710.333,70
2019	25.900.832.865,00	1.366.995.875,00	3.089.662.343,30	8.143.659.492,87	38.501.150.576,17

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga memiliki peranan yang tidak kalah penting demi mendongkrak besarnya pendapatan asli daerah walaupun persentasenya jauh lebih kecil. Akan tetapi, semua sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah sebenarnya sangat berpotensi bila digali secara maksimal.

Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan, dan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak,

sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Tidak hanya Pajak yang berperan dalam Pendapatan Asli Daerah, Retribusi juga mempunyai andil yang sangat besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah suatu wilayah. Dengan adanya retribusi, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pelayan publik untuk mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah, karena pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulang Bawang tidak terealisasi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pusat pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak maksimal dan memerlukan strategi yang akurat.

Dalam beberapa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mohammad Afandy (2013) dan Hendrik Worumi (2018) menjelaskan bahwa masih adanya penghambat dilapangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, sumber daya aparatur yang belum merata, dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal. Dan faktor – faktor tersebut yang dijadikan refrensi oleh penulis untuk membuktikan apakah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengalami hal yang serupa atau ada faktor lain dalam rangka meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus ditingkatkan dengan menggunakan strategi yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang dapat diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor – Faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
3. Apakah strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang harusnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Kinerja Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan. Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut Halim (2013) “analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA.

## **2.1.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.1.1 Efektivitas**

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan.

Adapun pengertian efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agoes Sukirno (2000;180) adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas

hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan. Sedangkan untuk Efisiensi di definisikan sebagai bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumberdaya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ruchyat Kosasih dalam Agoes Sukirno (2000;180) mendefinisikan efektivitas sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan ,sampai dengan pencapaian tujuan yang di tetapkan,baik di tinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja,kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan.

#### **2.1.1.2 Kontribusi**

Menurut Guritno (dalam Adelina, 2012), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor publik di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.

#### **2.1.1.3 Efisiensi**

Sektor publik sering di nilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang

terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Dan Efisiensi sebagai ”bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki”. Suatu organisasi di anggap efektif, bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat dan mentaati peraturan yang berlaku.

### **2.1.2 Strategi**

Syofian Assauri (2011:9) mendefinisikan manajemen strategis merupakan proses penetapan misi, visi dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Pada dasarnya ”manajemen strategis sama saja dengan manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil

ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang- Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan asli, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - b. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari

keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan



(BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.(3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu:

(1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2)

Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

(3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5)

Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah

antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- c. Dana Alokasi Khusus berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

#### **2.1.4 Pusat Pertanggungjawaban Pada Sektor Publik**

Konsep pusat pertanggung jawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan secara terdesentralisasi. Organisasi yang dibagi kedalam pusat-pusat pertanggung jawaban akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggung jawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.

Menurut Mardiasmo (2009) pusat pertanggungjawaban diorganisasi sektor publik di bagi menjadi 4 yaitu:

a. Pusat Biaya

Hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintahan merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sector public adalah pelayanan public. Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai unit organisasi sebagai pusat biaya adalah seberapa besar input yang digunakan oleh unit organisasi tersebut untuk mencapai atau menghasilkan output tertentu pula baik berupa fisik maupun nonfisik, tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian secara finansialnya. Pada pusat biaya efisiensi dapat ditentukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan atau dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas unit organisasi dapat ditentukan dengan misalnya, mengukur tingkat keterjangkauan, kualitas dan kapuasan publik dari output yang telah dihasilkan tersebut dengan metode survey.

b. Pusat Pendapatan

Pada organisasi sector publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuannya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada input yang digunakan (biaya), namun semua sumber daya yang digunakan (misalnya adalah anggaran) digunakan dalam rangka untuk melaksanakan

pemungutan, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Pada organisasi pemerintah pusat, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah Kementerian Keuangan, terutama untuk Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Pusat Laba

Yaitu organisasi yang berfungsi menghasilkan laba untuk membantumeningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan public. kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Biasanya unit organisasi ini adalah unit bisnis milik pemerintah atau sebagian usahanya dimiliki pemerintah atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada unit orgnaisasi ini, proses pembiayaanya tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara atau daerah, sedangkan operasionalnya organisasi bisnis.

d. Pusat Investasi

Yaitu pusat pertanggungjawaban yang manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Menurut Hartono (2009) investasi adalah pengorbanan konsumsi pada masa saat ini untuk memperoleh manfaat di masa mendatang. Dilihat dari segi manfaat yang akan diperoleh, investasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tidak harus langsung menghasilkan imbalan keuangan (*return*), tetapi dapat juga bersifat tidak langsung yaitu apabila keputusan investasinya dapat

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas anggaran.

### **2.1.5 Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.6 Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sinaga dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi Pemerintah Pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

## 2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Hasanusi (2015)	Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat	Masih banyaknya hambatan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seperti lemahnya sistem pendataan, kurangnya pemungutan pajak dan retribusi karena dibutuhkannya pendataan ulang, harus dilakukan pembenahan manajemen, tidak ada ketegasan bagi penunggak pajak, dan kurangnya tax base karena masih banyak yang belum terdaftar
2.	Worumi, Hendrik. (2018).	Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua	Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi selama ini masih belum maksimal, seperti Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan target capaian, dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2017 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan PAD belum maksimal dilaksanakan, hanya tiga sampai empat item yang terlaksana sedangkan yang lain belum

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
			<p>terlaksana, begitu pula lain-lain pendapatan yang sah, banyak sekali bagian-bagian yang tidak dioptimalkan untuk menambah PAD Kabupaten Sarmi. Kedua, Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, selama ini berjalan yang melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah belum terrealisasi dengan baik. Sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah belum dimanfaatkan dalam pengelolaannya.</p>
3.	<p>Mohammad Afandy (2013)</p>	<p>Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>Masih adanya penghambat dilapangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah bahwa masih terdapat penghambat dalam pelaksanaan perolehan pajak daerah antara lain: kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran pajak daerah, sumber daya aparatur yang belum merata atau tingkat profesional kerja sehingga pengelolaan potensi pos-pos pajak daerah belum dapat tercapai dari target ataupun realisasi pajak daerah secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat pendapatan asli daerah dari pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara</p>
4.	<p>I. B. Restu Surya Andika A, I Putu Dharmanu Yudartha, &amp;</p>	<p>Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi</p>	<p>Indikator diperoleh bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dinilai belum dilakukan secara optimal mengingat berdasarkan hasil</p>



No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
	Putu Eka Purnamaningsih	Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli)	temuan penelitian masih banyak peluang dan ancaman yang belum diidentifikasi dan luput dari pengamatan organisasi. Dan indikatorpenilaian lingkungan internal diperoleh bahwa dalam proses ini belum dilakukan secara optimal, perlu dilakukan analisis danidentifikasi yang lebih mendalam terutamayang memfokuskan aspek inputs, process,dan outputs.

Sumber : [www.scholar.google.co.id](http://www.scholar.google.co.id)

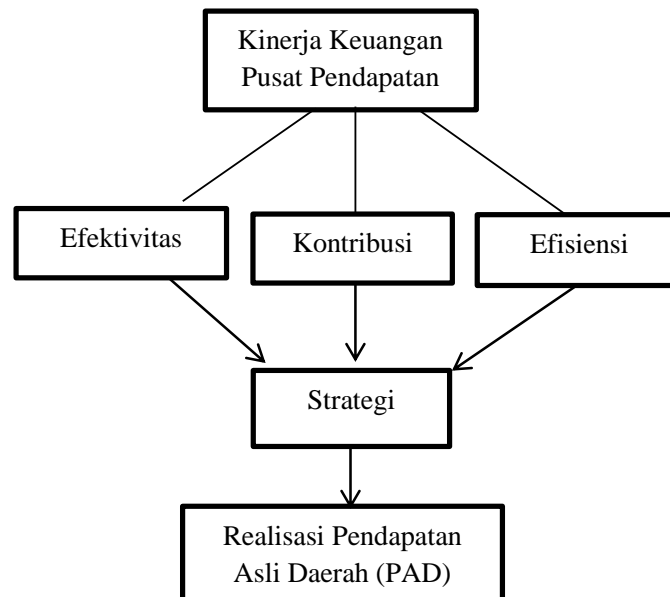
### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas, kontribusi dan efisiensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Efektivitas adalah sejauh mana tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi pajak daerah dengan target penerimaan. Rasio dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang digunakan dari perhitungan dengan menggunakan kriteria efektivitas. Dan efisiensi untuk mengetahui perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan seberapa besar kontribusi masing-masing penerimaan terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat diketahui strategi apa yang cocok untuk digunakan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah tersebut. Dan dari tiga faktor tersebut akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan dari hasil perbandingan tersebut akan dilakukan observasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan tiga faktor tersebut dan akan membentuk sebuah strategi untuk menggali realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Aan Komariah dan Djam'an Satori (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiyono (2012) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas,

keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

### **3.3 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020.

### **3.4 Subjek Penelitian**

Sugiyono (2009) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Subjek penelitian ini terdiri atas:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD)  
Kabupaten Tulang Bawang

3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

### **3.5 Objek Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai pusat pendapatan untuk memaksimalkan tugasnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu berikut adalah objek penelitian ini:

1. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari efektivitas, kontribusi, dan efisiensi menjadi indikator untuk menentukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mengkaji strategi apa saja yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Mendeskripsikan masalah dan kendala dalam pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### **3.6 Tehnik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data

yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel apa yang harus diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan para pegawai dinas-dinas terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.7 Metode Analisis**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio.

### **3.8 Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Pusat Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2. Mengetahui letak kelebihan atau kelemahan untuk mengevaluasi faktor – faktor tersebut
3. Menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah

## V. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari faktor Efektivitas dan Kontribusi menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan evaluasi dan menentukan strategi yang tepat untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Dilihat dari faktor Efisiensi menunjukkan bahwa 6 tahun terakhir tergolong sangat efisien tetapi jika dilihat dan dibandingkan dari data yang berupa daftar dan biaya kegiatan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sudah sangat baik dalam segi biaya tetapi dalam segi realisasinya masih tergolong kurang baik karena seharusnya bisa mendapatkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih.
3. Untuk pengelolaan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tergolong sangat baik, tetapi untuk pengelolaan Retribusi Daerah masih kurang karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang hanya menjadi koordinator dan yang mengelola langsung Retribusi Daerah adalah Satker/Dinas terkait.



4. Strategi yang telah dirancang oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah baik namun masih terhalang dengan regulasi/peraturan yang ada sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sulit untuk menerapkan strategi tersebut. Contohnya yaitu seperti penarikan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak bisa membuat strategi terkait penarikan Retribusi Daerah karena hal tersebut adalah kewenangan dari Satker/Dinas terkait.

## **5.1 Saran**

Berdasarkan pengkajian hasil dilapangan maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang mudah – mudahan bermanfaat bagi lembaga ataupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Untuk Lembaga

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, namun masih banyak yang perlu dievaluasi untuk peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor Retribusi Daerah. Selama ini Badan Pendapatan Daerah hanya bertugas sebagai koordinator saja untuk Retribusi Daerah karena itu adalah tanggung jawab Satker/Dinas terkait. Bukan bermaksud membandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang lain. Tetapi alangkah baiknya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan dengan membentuk BPPRD (Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah). Menurut saya, hal ini dapat meningkatkan realisasi PAD Kabupaten Tulang Bawang karena Retribusi Daerah sudah di kelola sendiri tanpa ada campur tangan dari Satker/Dinas lainnya.

## 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jika memang ingin meneruskan penelitian ini saya berharap kalian untuk mengeksplor lebih luas lagi tentang penelitian ini dengan kuisisioner yang cakupannya lebih luas.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian senantiasa dihadapkan pada keterbatasan – keterbatasan, baik dalam hasil pembahasan penelitian dan kuisisioner pertanyaan dalam penelitian:

1. Penelitian ini tidak bisa menjabarkan lebih lanjut tentang Retribusi Daerah karena dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah dan yang memungut langsung Retribusi Daerah tersebut adalah Satker/Dinas terkait.
2. Dilihat dari aspek kuisisioner yang digunakan untuk mengungkap hasil atau pembahasan penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dan fakta yang ada. Akan tetapi pertanyaan dan pernyataan dalam interaksi dengan narasumber sudah mampu mengungkap fakta yang ada dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Abdul Halim. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Agoes, Sukrisno. 2000. *Auditing Pemeriksaan Akuntan*. Jilid 1. Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2015. *Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014*. Lampung.
- . 2016. *Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015*. Lampung.
- . 2017. *Laporan Realisasi Pendapatan Tulang Bawang Tahun 2016*. Lampung.
- . 2018. *Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017*. Lampung.
- . 2019. *Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018*. Lampung.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. *Masalah dan Kendala Pemungutan Pendapatan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang*. Lampung.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2017. *Penerapan Standar Operasional (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang*. Lampung.

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. *Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang*. Lampung.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2019. *Analisis Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*. Lampung.
- Hasanusi.2015..*Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat*. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 1. No. 1:1 - 18.
- I.B Restu Surya Andika, I Putu Dharmanu Yudharta, Putu Eka Purnamaningsih.2018..*Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli*. Universitas Udayana. Vol. 1. No. 2:1 - 8.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan
- Mardiasmo.2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Mohammad Afandy. 2013..*Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah di Kabupaten Penajem Paser Utara*. Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3Hal. 1269-1282
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.

Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosadakarya

Syofian. 2011. *Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage. Indonesia*. Jakarta.

Syahriandi, LCA Robin Jonathan, Elfreda Aplonia Lau. 2016. *Efektivitas Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur*. Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 5. No. 1

Worumi, Hendrik. 2018. *Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua*. Jurnal Ekologi Birokrasi. Vol. 6. No. 3:23 - 39.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara  
Perpajakan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

[www.scholar.google.co.id](http://www.scholar.google.co.id)